Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



ANALISIS SISTEM PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PUBLIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

Muhammad Nefrian Narotama[1], Nazarina Desi Arisanti[2], Arinni Adinda Musdalifah[3], Eva Hany Fanida[4], Galih Wahyu Pradana[5]

[1-5] Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2026
Revised November 2026
Accepted November 2026
Available November 2026

24040674047@mhs.unesa.ac.id
24040674059@mhs.unesa.ac.id
24040674060@mhs.unesa.ac.id
evafanida@unesa.ac.id
galihpradana@unesa.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan organisasi publik untuk menilai pencapaian tujuan, penggunaan sumber daya, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis sistem pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, meliputi penerapan SAKIP, indikator, pencapaian target, serta faktor pendukung dan kendala. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan dokumentasi. Data diperoleh dari dokumen resmi, terutama LKjIP Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, dan Renstra Perubahan Kedua Tahun 2019–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa tiga dari empat indikator kinerja utama melampaui target, yaitu evaluasi implementasi SAKIP sebesar 100,92%, jalan dengan RVK di bawah 0,75 sebesar 101,48%, dan jalan yang memenuhi persyaratan teknis sebesar 101,42%. Sementara itu, indikator jalan dalam kondisi mantap mencapai 95,29% dan belum memenuhi target. Kendala yang dihadapi meliputi kerusakan jalan, cuaca ekstrem, kendaraan bermuatan berlebih, dan keterbatasan anggaran. Secara umum, pengukuran kinerja membantu memperkuat akuntabilitas serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pelayanan jalan.

***Kata kunci**: pengukuran kinerja, organisasi publik, SAKIP, Dinas PU Bina Marga Jawa Timur*

ABSTRACT

Performance measurement is an important part of public organizations to assess goal achievement, resource utilization, and service quality. This article analyzes the performance measurement system of the East Java Provincial Public Works and Bina Marga Agency, including the implementation of SAKIP, performance indicators, target achievement, and supporting and constraining factors. This study uses a qualitative descriptive approach through literature review and documentation. Data were obtained from official documents, particularly the 2024 performance report, the 2024 revised performance agreement, and the 2019–2024 revised strategic plan. The findings show that three of the four main indicators exceeded their targets: SAKIP evaluation (100.92%), roads with a volume-capacity ratio below 0.75 (101.48%), and roads meeting technical requirements (101.42%). Meanwhile, the indicator for roads in stable condition reached 95.29% and did not meet its target. Challenges include road deterioration, extreme weather, overloaded vehicles, and limited maintenance budgets. Overall, performance measurement strengthens accountability and supports evaluation and improvement of road services.

***Keywords**: performance measurement, public organization, SAKIP, East Java Bina Marga Agency*

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PENDAHULUAN

Kinerja organisasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi publik tidak hanya dituntut untuk menjalankan program sesuai dengan peraturan, tetapi juga harus mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menggunakan anggaran secara efektif dan efisien, serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu, pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan target yang direncanakan.

Pengukuran kinerja sektor publik dapat dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Hasil pengukuran tersebut dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program, mengidentifikasi hambatan, serta menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, pengukuran kinerja tidak cukup hanya melihat besarnya anggaran yang digunakan, tetapi juga perlu memperhatikan hasil kegiatan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, organisasi publik dapat dinilai berdasarkan pencapaian tujuan dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Salah satu organisasi publik yang dapat dijadikan objek kajian adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Dinas ini memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum kebinamargaan, termasuk penyelenggaraan jalan provinsi. Kinerja organisasi ini penting untuk diperhatikan karena kondisi jalan berpengaruh terhadap kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang, aksesibilitas antarwilayah, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur menggunakan dokumen perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan LKjIP Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan melalui dua sasaran strategis dengan empat indikator utama, yaitu nilai evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), persentase jalan provinsi dengan tingkat pelayanan yang memenuhi ketentuan rasio volume kapasitas di bawah 0,75, persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap, serta persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pengukuran kinerja mencakup aspek



akuntabilitas organisasi dan kualitas pelayanan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui bagaimana sistem pengukuran kinerja diterapkan, sejauh mana target yang ditetapkan dapat dicapai, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian kinerja. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak pengukuran kinerja dan menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan bagi Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menjelaskan konsep dan kerangka pengukuran kinerja organisasi publik, mendeskripsikan penerapannya pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, serta menganalisis capaian, faktor pendukung, kendala, dan rekomendasi perbaikan.

KERANGKA ANALISIS

Konsep Kinerja Organisasi Publik

Kinerja organisasi publik merupakan gambaran mengenai sejauh mana suatu organisasi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari hasil yang dicapai serta manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, organisasi publik perlu memastikan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan masyarakat. Pengukuran kinerja organisasi publik penting dilakukan karena organisasi pemerintah bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya dan anggaran negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui pengukuran kinerja, pemerintah dapat mengetahui keberhasilan program, menemukan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, pengukuran kinerja juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks penelitian ini, kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dinilai berdasarkan pencapaian sasaran organisasi dan kualitas pelayanan infrastruktur jalan, bukan hanya berdasarkan pelaksanaan kegiatan. Penilaian tersebut menjadi dasar untuk memahami sejauh mana organisasi telah menjalankan tugasnya dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki.

Konsep Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses untuk menilai keberhasilan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



dengan menggunakan indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan rencana. Pengukuran kinerja sektor publik memiliki beberapa tujuan, antara lain menilai pencapaian target, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, mendukung pengambilan keputusan, dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengukuran kinerja perlu didasarkan pada indikator yang jelas, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta perbandingan antara target dan realisasi. Dengan cara tersebut, penilaian kinerja tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi juga didukung oleh informasi yang terukur.

Teori dan Kerangka Pengukuran Kinerja

Salah satu kerangka yang digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi publik adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja instansi pemerintah. Sistem ini menghubungkan proses perencanaan, penetapan target, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Pelaksanaan SAKIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengatur petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Selain SAKIP, pengukuran kinerja sektor publik dapat dianalisis menggunakan kerangka *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. *Input* merupakan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program, seperti anggaran, tenaga kerja, dan sarana pendukung. *Process* adalah tahapan atau kegiatan yang dilakukan untuk mengolah sumber daya tersebut. *Output* merupakan hasil langsung dari kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan *outcome* merupakan manfaat atau perubahan yang dihasilkan dari *output* tersebut.

Kerangka berikutnya adalah efektivitas dan efisiensi. Efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan atau target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam pengukuran kinerja organisasi publik, efektivitas dapat dilihat melalui perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja. Sementara itu, efisiensi berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan keluaran atau mencapai tujuan. Penilaian efisiensi perlu mempertimbangkan hubungan antara anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai, bukan hanya melihat besarnya anggaran yang terserap. Ketiga kerangka tersebut



digunakan secara saling melengkapi dalam menganalisis kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. SAKIP digunakan untuk memahami sistem perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja, kerangka *input-process-output-outcome* digunakan untuk melihat hubungan antara sumber daya, kegiatan, dan hasil, sedangkan konsep efektivitas dan efisiensi digunakan untuk menilai pencapaian target serta penggunaan sumber daya.

Indikator Pengukuran Kinerja Organisasi Publik

Indikator kinerja merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu organisasi telah mencapai tujuan dan target yang ditetapkan. Indikator yang baik perlu berkaitan dengan sasaran organisasi, dapat diukur, dan didukung oleh data yang jelas. Dalam organisasi sektor publik, indikator kinerja digunakan untuk menilai pelaksanaan program sekaligus memberikan gambaran mengenai hasil pelayanan yang diterima masyarakat. Berdasarkan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, pengukuran kinerja organisasi mencakup dua sasaran strategis yang diukur melalui empat indikator utama, yaitu nilai evaluasi implementasi SAKIP, persentase jalan provinsi dengan RVK di bawah 0,75, persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap, serta persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis. Keempat indikator tersebut menjadi dasar untuk menilai pencapaian sasaran organisasi pada tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penggambaran dan pemahaman mengenai penerapan sistem pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Melalui pendekatan ini, pembahasan diarahkan untuk melihat bagaimana sistem pengukuran kinerja diterapkan, bagaimana pencapaian target yang telah ditetapkan, serta faktor-faktor yang memengaruhi hasil kinerja organisasi.

Objek dalam penelitian ini adalah sistem pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, khususnya pada pelaksanaan dan pencapaian kinerja tahun 2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa dokumen resmi, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, Rencana Strategis Perubahan Kedua Tahun 2019–2024, serta profil Dinas Pekerjaan Umum

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan peraturan perundang-undangan dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan pengukuran kinerja organisasi publik.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi yang memuat informasi mengenai perencanaan, target, realisasi, dan pelaporan kinerja Dinas. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan sesuai dengan fokus pembahasan agar lebih mudah dianalisis. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menguraikan informasi yang diperoleh dari dokumen dan sumber terkait. Analisis diawali dengan mengidentifikasi sistem pengukuran kinerja yang diterapkan, kemudian membandingkan target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja tahun 2024. Selanjutnya, hasil tersebut dianalisis menggunakan kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *input-process-output-outcome*, serta konsep efektivitas dan efisiensi. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, khususnya kebinamargaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas bertanggung jawab membantu Gubernur Jawa Timur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi serta melaksanakan tugas pembantuan di bidang tersebut. Untuk menjalankan tugasnya, Dinas memiliki beberapa fungsi, yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pekerjaan umum kebinamargaan, melakukan evaluasi serta menyusun laporan, menyelenggarakan administrasi Dinas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Visi yang menjadi pedoman Dinas sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak melalui tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif dengan mengutamakan kerja sama serta semangat gotong royong. Sementara itu, tujuan Dinas adalah menyediakan pelayanan jalan provinsi yang prima untuk mendukung distribusi darat, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, menciptakan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



keseimbangan antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, struktur organisasi Dinas terdiri atas Sekretariat dan empat bidang teknis, yaitu Bidang Pengaturan dan Pengendalian, Bidang Bina Teknik, Bidang Pembangunan dan Peningkatan, serta Bidang Pemeliharaan. Selain itu, terdapat 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Jalan dan Jembatan yang tersebar di wilayah Jawa Timur serta UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi sebagai unit pendukung pelaksanaan tugas teknis.

Penerapan Pengukuran Kinerja pada Organisasi

Penerapan pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Dalam pelaksanaannya, SAKIP mencakup beberapa tahapan, mulai dari perencanaan strategis, penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja, hingga evaluasi. Pengukuran kinerja Dinas berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2019–2024 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2024, terdapat dua sasaran strategis yang ditetapkan, yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta terwujudnya jalan provinsi yang aman, nyaman, dan lancar sekaligus meningkatnya akses jalan menuju kawasan potensial.

Setiap sasaran strategis tersebut memiliki indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaiannya. Penilaian dilakukan dengan membandingkan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi selama tahun anggaran berlangsung. Hasil pengukuran kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja organisasi. Selain melihat pencapaian target, pengukuran kinerja juga memperhatikan hubungan antara *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. *Input* berkaitan dengan anggaran serta sumber daya yang tersedia, *process* mencakup pelaksanaan program dan kegiatan, *output* merupakan hasil langsung dari pekerjaan yang dilakukan, sedangkan *outcome* menggambarkan manfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh pengguna jalan. Dengan demikian, penilaian kinerja tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Indikator dan Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 dilakukan menggunakan empat indikator utama yang terbagi ke dalam dua sasaran strategis.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Keempat indikator tersebut digunakan untuk menilai pencapaian kinerja organisasi, baik dari sisi akuntabilitas maupun kualitas pelayanan infrastruktur jalan.

1. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan di lingkungan Dinas. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 85,10%, sedangkan realisasinya mencapai 85,88% dengan tingkat capaian sebesar 100,92%. Penilaian tersebut mencakup aspek perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil ini memperlihatkan bahwa proses perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja di lingkungan Dinas telah terlaksana dengan cukup baik.

2. Persentase Jalan Provinsi yang Memenuhi Tingkat Pelayanan (RVK di bawah 0,75)

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pelayanan jalan melalui perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan. Target yang ditentukan pada tahun 2024 sebesar 89,51%, sementara realisasinya mencapai 90,84%. Jalan provinsi yang memiliki nilai RVK di bawah 0,75 tercatat sepanjang 1.290,83 km dari total panjang jalan 1.421 km. Dengan hasil tersebut, capaian indikator mencapai 101,48%. Pencapaian ini didukung oleh kegiatan pelebaran jalan menuju standar sepanjang 4,94 km serta perbaikan manajemen lalu lintas.

3. Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap

Indikator ini menunjukkan persentase jalan provinsi yang berada dalam kondisi baik dan sedang. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 93,66%, tetapi realisasi yang berhasil dicapai hanya 89,61% atau sepanjang 1.273,32 km jalan dalam kondisi mantap. Dengan demikian, tingkat capaian indikator ini sebesar 95,29% dan belum memenuhi target yang telah ditentukan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kerusakan jalan yang terjadi lebih cepat dibandingkan kemampuan penanganannya. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain, seperti umur rencana jalan yang telah terlampaui, cuaca ekstrem, kendaraan dengan muatan berlebih, serta keterbatasan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan.

4. Persentase Jalan Provinsi yang Memenuhi Persyaratan Teknis

Indikator ini digunakan untuk menilai kesesuaian kondisi jalan dengan persyaratan teknis yang berlaku. Beberapa aspek yang diperhatikan meliputi lebar minimum jalur lalu lintas dan bahu jalan, kelandaian maksimum, serta kondisi bangunan pelengkap jalan. Pada tahun 2024, target indikator sebesar 62,55%, sedangkan realisasinya mencapai 63,44% dengan tingkat capaian

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



101,42%. Hasil tersebut didukung oleh pelaksanaan pelebaran jalur lalu lintas, penggantian jembatan, dan pemeliharaan berkala jembatan.

Hasil Pengukuran dan Pencapaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur selama tahun 2024 menunjukkan adanya perbedaan pencapaian pada setiap indikator. Perbandingan antara target, realisasi, dan tingkat capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	85,10%	85,88%	100,92
2	Persentase jalan provinsi dengan RVK < 0,75	89,51%	90,84%	101,48
3	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	93,66%	89,61%	95,29
4	Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis	62,55%	63,44%	101,42

Berdasarkan hasil tersebut, terdapat tiga indikator yang berhasil melampaui target dengan capaian di atas 100%. Sementara itu, satu indikator lainnya, yaitu persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap, belum mencapai target meskipun tingkat pencapaiannya masih berada pada angka 95,29%. Pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, indikator evaluasi implementasi SAKIP memperoleh realisasi sebesar 85,88% dari target 85,10%. Capaian sebesar 100,92% tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas telah berjalan dengan cukup baik.

Selanjutnya, pada sasaran terwujudnya jalan provinsi yang aman, nyaman, dan lancar serta meningkatnya akses jalan menuju kawasan potensial, terdapat tiga indikator yang digunakan. Persentase jalan provinsi dengan nilai RVK di bawah 0,75 berhasil mencapai realisasi 90,84% dari target 89,51%, dengan tingkat capaian 101,48%. Indikator jalan yang memenuhi persyaratan teknis juga melampaui target, yaitu dengan realisasi 63,44% dari target 62,55% dan capaian sebesar 101,42%. Namun, indikator jalan provinsi dalam kondisi mantap hanya mencapai realisasi 89,61% dari target 93,66%, sehingga tingkat capaiannya sebesar 95,29%.

Dari sisi penggunaan anggaran, Dinas memiliki total pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp830.678.543.453,00. Dari jumlah tersebut, anggaran yang terealisasi mencapai

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Rp763.752.278.385,00 atau sebesar 91,94%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar anggaran telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Jika dikaitkan dengan capaian kinerja yang relatif tinggi, tingkat penyerapan anggaran tersebut dapat menjadi gambaran awal mengenai penggunaan sumber daya. Namun, penilaian efisiensi tetap perlu memperhatikan hubungan antara anggaran yang digunakan dan hasil yang diperoleh.

Analisis Kinerja Berdasarkan Kerangka yang Digunakan

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dapat dianalisis melalui tiga kerangka, yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *input-process-output-outcome*, serta efektivitas dan efisiensi. Ketiga kerangka tersebut digunakan untuk melihat penerapan sistem pengukuran kinerja dari beberapa sudut pandang. Dilihat dari penerapan SAKIP, Dinas telah menjalankan tahapan perencanaan, penetapan perjanjian kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi. Hal ini terlihat dari adanya target kinerja yang ditetapkan serta laporan realisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi. Nilai evaluasi implementasi SAKIP yang mencapai 100,92% menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, peningkatan tetap diperlukan agar kualitas setiap komponen penilaian dapat terus diperbaiki.

Selanjutnya, melalui kerangka *input-process-output-outcome*, penggunaan anggaran dan sumber daya manusia menjadi bagian dari *input* yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari *process* yang dilakukan oleh Dinas untuk menghasilkan *output* berupa peningkatan panjang jalan dengan nilai RVK di bawah 0,75, pemenuhan persyaratan teknis jalan, serta upaya mempertahankan kondisi jalan agar tetap mantap. Hasil tersebut diharapkan dapat memberikan *outcome* berupa peningkatan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dari aspek efektivitas, pencapaian tiga indikator yang melampaui target menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran kinerja telah terlaksana sesuai dengan rencana. Namun, indikator kondisi jalan mantap yang belum mencapai target memperlihatkan bahwa efektivitas kinerja pada aspek pemeliharaan dan penanganan kondisi jalan masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, dari sisi efisiensi, realisasi anggaran sebesar 91,94% yang disertai capaian kinerja relatif tinggi menunjukkan bahwa Dinas mampu menggunakan sebagian besar sumber daya anggaran untuk mendukung pencapaian target. Meski demikian, tingkat efisiensi tidak hanya dapat dinilai dari



persentase penyerapan anggaran, tetapi juga perlu mempertimbangkan kesesuaian antara penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai.

Faktor Pendukung, Kendala, dan Dampak Kinerja

Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur didukung oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam menerapkan SAKIP serta melaksanakan evaluasi secara berkala. Selain itu, pelaksanaan program pelebaran dan peningkatan kapasitas jalan turut membantu pencapaian indikator tingkat pelayanan jalan berdasarkan RVK dan pemenuhan persyaratan teknis. Dinas juga tetap melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi pencapaian kinerja, khususnya pada indikator kondisi jalan mantap. Kerusakan jalan yang terjadi lebih cepat dibandingkan penanganannya menjadi salah satu permasalahan utama. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh umur rencana jalan yang telah terlampaui, cuaca ekstrem, kendaraan dengan muatan berlebih, serta terbatasnya anggaran untuk kegiatan rekonstruksi dan pemeliharaan berkala.

Penerapan sistem pengukuran kinerja juga memberikan dampak terhadap pelaksanaan tugas organisasi. Dari sisi internal, pengukuran kinerja membantu mengarahkan proses perencanaan dan pelaksanaan program agar lebih sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, dari sisi eksternal, data kinerja yang terukur dapat mendukung pertanggungjawaban organisasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Selain itu, hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan langkah perbaikan pada tahun berikutnya.

Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan

Hasil evaluasi kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur telah berhasil mencapai sebagian besar target yang ditetapkan. Meskipun demikian, pencapaian setiap indikator masih menunjukkan hasil yang berbeda. Indikator kondisi jalan mantap menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian karena realisasinya belum sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja pada periode berikutnya, terdapat beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan rekonstruksi jalan agar penanganan kerusakan dapat berjalan seimbang dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Kedua, memperkuat pengawasan terhadap kendaraan dengan



muatan berlebih melalui koordinasi bersama instansi terkait. Ketiga, meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan jaringan jalan. Keempat, melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja secara berkala agar indikator yang digunakan tetap sesuai dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat. Kelima, meningkatkan kualitas data serta sistem pemantauan kondisi jalan sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

KESIMPULAN

Pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dengan mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta didukung oleh kerangka *input-process-output-outcome* dan konsep efektivitas serta efisiensi. Pada tahun 2024, terdapat dua sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam empat indikator kinerja utama. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tiga indikator telah melampaui target, yaitu nilai evaluasi penerapan SAKIP, persentase jalan provinsi dengan nilai RVK di bawah 0,75, dan persentase jalan yang memenuhi persyaratan teknis. Sementara itu, indikator persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen organisasi dalam menerapkan SAKIP serta pelaksanaan berbagai program peningkatan kapasitas dan kualitas jalan. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi pencapaian kinerja, di antaranya kerusakan jalan yang terus meningkat, keterbatasan anggaran pemeliharaan, kondisi cuaca ekstrem, serta kendaraan dengan muatan berlebih. Secara keseluruhan, penerapan sistem pengukuran kinerja telah membantu meningkatkan akuntabilitas organisasi. Hasil pengukuran juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan dan menyusun perencanaan program pada periode selanjutnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disampaikan beberapa saran:

1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur perlu meningkatkan perhatian terhadap pencapaian indikator kondisi jalan mantap melalui penguatan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala.
2) Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan peningkatan anggaran serta pemanfaatan sumber daya secara optimal, terutama untuk kegiatan pemeliharaan dan rekonstruksi jalan agar kondisi jalan tetap terjaga.



3) Koordinasi dengan instansi terkait perlu ditingkatkan, khususnya dalam pengawasan kendaraan dengan muatan berlebih serta pengelolaan jaringan jalan agar penanganan permasalahan infrastruktur dapat berjalan lebih terpadu.

4) Hasil pengukuran kinerja sebaiknya tidak hanya digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dalam menentukan prioritas dan menyusun program kerja pada tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. (n.d.). Profil Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. (2022). Rencana strategis perubahan kedua tahun 2019–2024. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. (2024a). Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2024. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. (2024b). Perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

Dwiyanto, A. (2015). Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif (Edisi ke-2). Gadjah Mada University Press.

Hartati, A., Sos, S., Fanggidae, H. C., Binawati, E., Aisyah, S., Fanggidaae, F. O., ... & Lerrick, Y. F. (2022). Pengukuran kinerja sektor publik: Teori dan aplikasi. Media Sains Indonesia

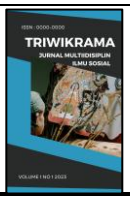
Judijanto, L., & Afandy, C. (2024). Pengukuran kinerja sektor publik. PT Mafy Media Literasi Indonesia.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mahmudi. (2019). Manajemen kinerja sektor publik (Edisi ke-3). UPP STIM YKPN.

Mahsun, M. (2022). Pengukuran kinerja sektor publik (Edisi ke-2). Universitas Terbuka.



Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2024). Laporan realisasi anggaran seluruh SKPD tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Presiden Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sabaryanto, T. (2016). Evaluasi implementasi SAKIP organisasi publik (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kebumen). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, *4*(2).